

MENGGAGAS STRATEGI REINVENTING GOVERNMENT

DALAM MEMANTAPKAN KEHIDUPAN BERBANGSA

Oleh : Titik Djumiarti, S. Sos. M.Si.

Abstraksi :

Nasionalisme adalah pilar utama dalam berbangsa dan bernegara. Pada hakekatnya nasionalisme dapat diwujudkan melalui kehidupan berbangsa yang normatif dan *adapted* terhadap lingkungan. Reinventing Government adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional); dan sikap perilaku birokrat (aspek perilaku) guna meningkatkan efektivitas organisasi. Merancang reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*cultural set*) birokrasi untuk berbagi peran dengan peran aktor non negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu strategi reinventing government dimplikasikan di dalam birokrasi pemerintah melalui pendekatan integral yakni menggabungkan pendekatan struktural dan kultural

Kata kunci: Nasionalisme, reinventing government, pendekatan structural, pendekatan cultural

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, sehingga masih diperlukan adanya penyadaran kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Ketika ada riak-riak kecil dan persilangan kepentingan, itu biasa dalam kehidupan bangsa dan itu suatu dinamika, sejauh menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Malahan akan menjadi statis jika isu persatuan dan kesatuan itu dikedepankan dengan mematikan dinamika, dan hal ini tidak sehat bagi masa depan bangsa kita yang akan menghadapi tantangan-tantangan berat memasuki era globalisasi.

Nasionalisme adalah pilar utama dalam berbangsa dan bernegara. Sebuah negara yang tidak ditopang dengan pilar nasionalisme yang kokoh akan menjadi rapuh, kemudian runtuh dan akhirnya tinggal sejarah. Kejayaan Bangsa Romawi, Mesir Kuno, Yunani, Majapahit, Sriwijaya, Gowa dan Mataram, kini tinggal kenangan yang hanya diketahui lewat buku sejarah dan sisa-sisa peninggalannya. Dan Kita tidak berharap negeri Republik Indonesia tercinta ini mengalami nasib yang sama dengan bangsa-bangsa pendahulunya.

Kita bahkan harus berfikir secara kontekstual dan memiliki visi ke depan tentang nasionalisme dan integrasi bangsa. Jika kini, muncul berbagai masalah aktual baru yang

menjadi agenda nasional sekaligus merupakan wajah baru masalah kebangsaan saat ini, bukan lagi sekedar nasionalisme dalam perspektif cinta Tanah Air secara konvensional sebagaimana awal-awal perjuangan dan pengisian kemerdekaan. Bukan pula soal kesatuan dan persatuan yang pasif, yang tidak peka terhadap dinamika dan munculnya masalah baru yang aktual dalam kehidupan bangsa.

Masalah kebangsaan tampaknya perlu lebih memberi bobot pada bagaimana memecahkan masalah-masalah mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara yang sering disebut era kebangkitan nasional kedua dalam konteks pembangunan nasional. Bangsa Indonesia benar-benar tengah berhadapan dengan tuntutan aktual tentang pembangunan demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan pembangunan, kelestarian lingkungan hidup, ketahanan budaya bangsa dalam menghadapi globalisasi, revolusi Iptek, masalah moral adalah tema-tema besar dalam dinamika kehidupan berbangsa. Dalam konteks kebangsaan tersebut masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) termasuk agenda nasional yang dipandang penting untuk dipecahkan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang kokoh. Dalam menghadapi masalah-masalah aktual tersebut, suatu kondisi yang mendesak lahirnya pelaku-pelaku pembangunan yang memiliki visi ke depan, berani mengambil tindakan untuk kepentingan bangsa dan menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa.

Pada hakekatnya kehidupan berbangsa yang secara normatif ingin diwujudkan adalah resultan dari berbagai faktor dan kondisi. Oleh karena itu untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang ideal menuntut intervensi dan manipulasi berbagai faktor secara simultan, sistematis dan terpadu, diantaranya adalah administrasi pemerintahan (Tjokrowinoto, 1996: hal.159). Oleh karena itu, dengan adanya perubahan sosial yang bersifat fundamental, menuntut pula perubahan dalam administrasi pemerintahan.

Sejak tahun 1980-an, suatu gerakan reformasi global telah dimulai, gerakan ini di dorong oleh 4(empat) variabel besar, yakni: (Kartono, 2006: hal 51-62)

1. Politik: keunggulan demokrasi dan kekuatan publik serta keunggulan sistem pasar transformasi peran pemerintah untuk mengurangi peran dan fungsinya.
2. Sosial: beberapa negara di dunia telah mengalami perubahan sosial yang mendasar, yaitu melakukan restrukturisasi ulang terhadap tatanan hukum, ekonomi, sosial dan politik, ditandai dengan perubahan yang mendasar dari masyarakat industri kemasyarakatan informasi.

3. Ekonomi: krisis ekonomi pada tahun 1990-an menyebabkan negara di dunia melakukan reformasi perpajakan untuk menarik investor masuk dan melakukan langkah privatisasi.
4. Institusional: semua negara di dunia telah menjadi bagian dari sistem ekonomi dan politik global. Kondisi ini ditandai dengan semakin berkembangnya kelembagaan di luar Negara seperti *World Bank*, IMF, WTO, ADB yang mengatur globalisasi dunia.

Dengan latar belakang kondisi demikian, maka kebutuhan akan perubahan dan adaptasi aparatur pemerintah sangatlah mendesak, termasuk reformasi administrasi di Indonesia.

Reformasi Administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional); dan sikap perilaku birokrat (aspek perilaku) guna meningkatkan efektivitas organisasi dan terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional (Mariana, 2009: hal 9) Reformasi administrasi mencakup perubahan yang menyusup keseluruhan jaringan birokrasi sebab birokrasi adalah orang-orang yang nantinya akan menjalankan reformasi administrasi publik.

Pendekatan teoritik yang mencuat sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan manajemen birokrasi publik, salah satunya dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1996) yang disebut mewirausahakan birokrasi (*reinventing government*). Oleh karena itu di butuhkan strategi tertentu untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan. Kata Strategi yang dimaksudkan disini adalah penggunaan titik pendongkrak utama untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam pemerintahan. Dengan sumberdaya yang kecil mampu mendongkrak perubahan besar dalam pemerintahan melalui *reinventing government*. Tulisan ini dimaksudkan menggagas strategi *reinventing government* untuk memantapkan kehidupan berbangsa.

PEMBAHASAN

Menumbuhkan Nasionalisme dalam Birokrasi

Pengertian Nasionalisme di sini, tentu bukan dalam arti sempit, simbolis dan seremonial belaka, seperti misalnya, seorang akan disebut nasionalis apabila selalu ikut

upacara bendera, meskipun dalam perilakunya senantiasa merugikan negara dan bangsanya. Nasionalisme adalah perasaan cinta, rasa memiliki dan mau berkorban dari individu atau sekelompok orang terhadap bangsa dan negaranya. Menurut Dr. Frederick Hertz dalam bukunya yang berjudul *Nationality in History and Politics*, mengidentifikasi 4(empat) unsur nasionalisme, yaitu : (dalam Handayani,TC Media Edisi ke-5, Agustus 2008)

- 1) Hasrat untuk mencapai kesatuan
- 2) Hasrat untuk mencapai kemerdekaan
- 3) Hasrat untuk mencapai keaslian
- 4) Hasrat untuk menjaga kehormatan bangsa.

Dalam perspektif aparat pemerintah, nasionalisme tidak semata-mata ditunjukkan melalui kegiatan seremonial dan simbolis semata, akan tetapi harus diaplikasikan dalam perilaku dan perbuatannya. Aparat Pemerintah dapat dikatakan nasionalis apabila dia telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Seorang nasionalis sejati pasti tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan negara seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan pemborosan uang negara. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan instrumen antara lain struktur organisasi yang tepat, uraian pekerjaan yang efektif, sumberdaya yang berkualitas dan renumerasi yang memadai dan semangat nasionalisme. Adapun faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya reformasi birokrasi pemerintah tersebut adalah: (Thoha, 2009:14)

- 1) Adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan dan pembaruan.

Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan aparatur pemerintah, sangat tergantung kebutuhan dari kebutuhan pimpinan nasional. Karena kebutuhan tersebut diwujudkan dalam kebijakan politik yang strategis dan menjadi program nasional dengan dukungan seluruh komponen negara.

- 2) Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional

Pemahaman terhadap lingkungan strategis nasional akan mendorong rencana dan tindakan pembaharuan aparatur pemerintah. Misalnya Krisis moneter tentu saja akan melahirkan kebijakan pembaharuan aparatur yang efektif, efisien dan ekonomis.

Perubahan sistem politik akan melahirkan sistem yang mengkomodasikan kepentingan dari kekuatan politik dan parpol sehingga terjadi penataan aparatur pemerintah. Misalnya dalam rekrutmen, promosi ditata hubungan yang tepat antara jabatan-jabatan politik dan jabatan karier

- 3) Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global.

Perubahan global di tingkat dunia mendorong pula untuk melakukan sistem pemerintahan yang baik. Misal, perkembangan teknologi informasi digunakan di negara-negara maju, menuntut pula aparat pemerintah kita melakukan perubahan.

- 4) Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintah

Perubahan paradigma dalam tata pemerintahan yang baik berupa penerapan prinsip desentralisasi, otonomi, demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi dan penegakan hukum merupakan dorongan yang kuat dalam melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan.

Kita sudah banyak mendengar program-program untuk mereformasi birokrasi diterapkan pada hampir seluruh departemen di negeri kita tercinta ini. Namun tidak banyak membawa hasil atau stagnan. Padahal program-program penyempurnaan birokrasi dibuat dengan baik yang akhirnya berhenti pada tahap implementasi. Mengapa?

Menemukan Kunci Reformasi Birokrasi dalam Reinventing Government

Pembaharuan Birokrasi haruslah disusun dengan rencana yang komprehensif, menyeluruh tidak sporadis dan parsialistik. Merancang reformasi birokrasi sesungguhnya bermakna merumuskan suatu model birokrasi yang dapat memperkuat kapasitas negara, melalui pendefinisian ulang dan lingkup intervensi pemerintah. Merancang reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*cultural set*) birokrasi untuk berbagi peran dengan peran aktor non negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, reformasi birokrasi sesungguhnya adalah menemukan upaya-upaya untuk melakukan tata kelola pemerintahan dengan dukungan administrasi publik.

Reinventing Government atau wirausaha birokrasi, pemerintah dengan bergaya wirausaha ini menjadi cara yang efisien dan efektif untuk menghindari kebangkrutan suatu birokrasi. Bagi Osborne dan Gaebler, organisasi birokrasi publik yang dijalankan berdasarkan peraturan tidak akan efektif dan kurang efisien, karena kinerjanya akan berjalan lambat dan terkesan bertele-tele. Akan tetapi, birokrasi yang digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya, akan lebih efektif dan efisien. Dengan mendudukkan misi organisasi sebagai tujuan, mereka dapat mengembangkan sistem anggaran dan peraturan sendiri yang memberi keleluasaan kepada karyawannya untuk mencapai misi organisasi tersebut. Osborne dan Gaebler memberikan posisi yang berhadapan antara misi dan peraturan dalam birokrasi organisasi publik. Birokrasi organisasi publik harus memilih salah satunya. Pilihan tersebut mengandung konsekuensi mengedepankan salah satu aspek akan mengabaikan aspek yang lain. (dalam Agus, 2005: 168)

Adanya peraturan dalam organisasi memang mempunyai tujuan yang baik, tetapi banyak kasus, hal tersebut menyebabkan organisasi berjalan lambat serta kurang mampu merespons tuntutan lingkungan yang berubah cepat. Dengan peraturan, orang tidak akan mampu melakukan apa yang menurut pandangannya benar, karena takut terkena sanksi jika ternyata ketahuan mengabaikan atau melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu, mengapa banyak pegawai pemerintah yang apatis dan tidak kreatif, serta melupakan misinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Menurut Osborne dan Gaebler karena adanya tarik menarik antara konsepsi peraturan dan misi. Peraturan memang dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan dan korupsi, tetapi dengan pengorbanan terjadi pemborosan (inefisiensi). Keunggulan organisasi yang digerakkan misi, dibandingkan yang digerakkan oleh peraturan adalah lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, lebih fleksibel serta akan mendorong semangat kerja yang lebih tinggi.

Menurut Osborne dan Gaebler, mentransformasi semangat wirausaha kedalam sektor publik tidaklah mudah, karena birokrasi sudah terlanjur memiliki citra buruk dan sikap mental yang kurang terpuji. Sebagaimana Ismani (dalam Thoha, 1996:30) menjelaskan bahwa sikap mental aparat birokrasi di Indonesia sebagian besar masih belum sesuai dengan tuntutan pembangunan. Masih nampak gejala sikap mental kurang bertanggungjawab, suka mencari jalan pintas, mengabaikan mutu, bergaya hidup mewah, dan suka meniru budaya barat. Menurut Ismani sikap tersebut justru akan menimbulkan etos kerja yang rendah dan produktifitas kerja yang rendah pula baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya Ismani menegaskan bahwa di kalangan pegawai negeri atau aparat birokrasi masih dominan

mentalitas “priyayi” yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Adapun permasalahan birokrasi yang sering dibahas dalam rangka reformasi administrasi publik adalah :

- a) Pelayanan publik, pada dasarnya aparat birokrasi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berkualitas pada masyarakat.
- b) Motivasi Pelayanan publik, membahas motivasi apa yang diberikan administrator dalam memberikan pelayanan kepada publik, berdasarkan norma ataukah perasaan.
- c) Kesalahan praktek administrasi, seperti lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan.
- d) Etika Administrasi Publik, seperti halnya penilaian baik dan buruk prosedur administrasi dan korupsi.
- e) Kinerja dan efektifitas, bagaimana kinerja dijalankan dan apakah sudah tercapai tujuan.
- f) Akuntabilitas publik, apakah semua kinerja aparat dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

Dengan latar belakang permasalahan ini, Osborne dan Gaebler menawarkan solusinya melalui *reinventing government* (Rego). Menurut Osborne dan Gaebler, fokus utamanya terletak pada penataan kembali peran birokrasi agar dapat merangsang pertumbuhan sektor swasta dan masyarakat luas dengan menerapkan 10 prinsip, yaitu:

- 1) Pemerintah hanya katalis yang mengarahkan dan bukan melaksanakan
- 2) Pemerintahan adalah milik rakyat, pemerintah memberdayakan masyarakat agar mampu melayani dirinya sendiri.
- 3) Pemerintahan harus mampu menciptakan sesuatu yang kompetitif
- 4) Pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Organisasi pelaksanaan yang menjalankan tugas harus sesuai dengan aturan-aturan organisasi yang berdasarkan misi.
- 5) Pemerintah yang berorientasi hasil yang diperoleh
- 6) Pemerintahan yang berorientasi pelanggan bukan birokrasi

- 7) Pemerintahan yang memiliki semangat wirausaha
- 8) Pemerintahan yang bersifat antisipatif
- 9) Pemerintahan yang desentralisasi
- 10) Pemerintahan yang berorientasi pasar dan mendorong perubahan melalui pasar.

Sebagai implikasi praktisnya, teori ini di sempurnakan melalui lima strategi *reinventing Government (the five strategies for reinventing government)* yakni *core strategies and culture strategies* dimana dibagi dalam :

- 1) Strategi inti dengan adanya kejelasan tujuan, kejelasan peran dan kejelasan arah
- 2) Strategi konsekuensi dengan adanya persaingan yang terkendali dalam manajemen dan kinerja
- 3) Strategi pelanggan; adanya jaminan mutu pelayanan
- 4) Strategi pengendalian; adanya pemberdayaan pada anggota organisasi
- 5) Strategi budaya dimana adanya penghentian kebiasaan yang tidak kondusif yang mampu mengubah pikiran.

Penerapan *reinventing Government* dalam Birokrasi di Indonesia, maka harus memenuhi persyaratan, yaitu : 1) penyiapan sumberdaya aparatur birokrasi yang siap dan mampu mendukung operasionalisasi konsep-konsep tersebut. 2) penyesuaian sistem dan prosedur kerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas kerja, 3) penyempurnaan peraturan-peraturan (regulasi) yang lebih akomodatif terhadap perubahan. Meskipun ada kekhawatiran dalam strategi *ReGo* yakni birokrasi pemerintahan yang tidak mengenal hati nurani dan keberpihakan kepada rakyat atau birokrasi yang tidak lagi dapat menjalankan mekanisme dan fungsinya sebagai pelayan publik. Kekhawatiran lain, bahwa *Rego* dianggap memiliki nafas yang kental dengan nuansa privatisasi organisasi publik.

Adanya kekhawatiran di atas maka di perlukan strategi yang berbeda untuk birokrasi pemerintahan di Indonesia, yang dirasa perlu menggabungkan praktek manajemen publik dengan manajemen privat. Menurut Giddens (Cassell, 1996: 122) dalam teori stukturasi menekankan integrasi *structure (structural principles of organization, rule resource sets, stretching across time and space)* dan *agency* (kekuatan tindakan individu).

Menurut Giddens untuk mengurangi ketidakpastian terhadap perubahan struktur organisasi perlu membatasi resiko-resiko dengan cara menghasilkan kehidupan modern yang lebih baik dan memuat kepastian-kepastian, melalui :

- Keberanian, kemauan, dan kemampuan para pemimpin organisasi publik dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya.
- Komitmen moral yang tinggi untuk benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
- Meningkatkan etos kerja birokrasi dan etos kerja pembangunan

PENUTUP

Kesimpulan

Konsep Reinventing Government, memang muncul terhadap kinerja pemerintah selama ini dan sebagai antisipasi atas berbagai perubahan yang selalu akan terjadi dalam organisasi. Dengan pembahasan di atas, bahwa dengan 10 strategi reinventing government dapat menjadi dasar bagi sebuah model baru pemerintahan (birokrasi) di masa depan. Akan tetapi harus dilakukan secara simultan dan terintegralistik melalui perubahan struktur dan kultur birokrasi. Perubahan-perubahan lain perlu dilakukan terhadap birokrasi seperti dilakukan *bureaucracy reengineering*, *rightsizing* dan perbaikan mekanisme *reward and punishment*. Penerapan reinventing Government membutuhkan arah yang jelas dan *political will* yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat. Selain itu diperlukan perubahan pola pikir dan mentalitas baru di tubuh birokrasi pemerintahan yakni *entrepreneurial bureaucratic* menjadi tata nilai budaya baru yang harus di internalisasikan dalam tubuh organisasi birokrasi. Adapun ciri-cirinya, yakni

- a) mampu merespon perubahan dan melihat peluang serta mengeksploitasi peluang menjadi menguntungkan,
- b) kemampuan untuk membuat yang tidak produktif menjadi produktif, kemampuan untuk dapat mendefinisikan resiko dan mampu meminimumkan,
- c) peka dan tanggap terhadap peluang dan tantangan, tidak terpeka dalam rutinitas,

- d) berwawasan masa depan dan sistemik,
- e) mampu memaksimalkan pendayagunaan sumberdaya.

Dalam literatur tentang organisasi, Robbins menyatakan: (dalam Keban, 2004:117) bahwa organisasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang ingin mencapai tujuan secara rasional, suatu koalisi dari konstituen yang berkuasa di mana mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol distribusi sumberdaya dalam organisasi, terdapat transformasi input-output dengan lingkungan, suatu kontrak sosial terdapat kesepakatan perilaku anggota organisasi dalam mencapai kompensasinya. Dengan demikian berimplikasi dalam praktek organisasi birokrasi yang mesti menggabungkan struktur dan perilaku manusia (anggota organisasi), perilaku dan sikap yang muncul dalam organisasi merupakan sikap dan perilaku struktural.. Struktur bersifat terbuka, artinya bila keadaan dan perkembangan masyarakat berubah maka struktur harus disesuaikan atau diadaptasikan. Karenanya, upaya untuk menilai ketepatan suatu struktur dari waktu ke waktu merupakan upaya yang sangat bernilai demi perbaikan kinerja organisasi termasuk kinerja anggotanya.

Dengan demikian perubahan struktur birokrasi pemerintahan yang mengacu pada blue print strategi reinventing government, akan dapat mengetahui bagaimana sebenarnya struktur organisasi birokrasi dibuat, bagaimana dampaknya kinerja organisasi dan individu. Keyakinan penulis bahwa apabila reinventing government dapat di jalankan sesuai dengan harapan dan kenyataan Osborne maka kinerja individu akan menumbuhkan sikap dan perilaku melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Aparat Birokrasi tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan negara seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan pemborosan uang negara.

Saran :

Konsep reinventing Government dapat dimplikasikan di dalam birokrasi pemerintah melalui pendekatan integral yakni menggabungkan pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural berkaitan dengan aktifitas organisasi birokrasi dituangkan dalam struktur dengan harapan pencapaian tujuan yang efisien dan efektif. Sedangkan di dalam struktur organisasi di perlukan pola interaksi anggota organisasi yang selalu melibatkan sikap dan perilaku anggota organisasi tersebut (pendekatan kultural).

Dimensi struktural dan kultural tersebut bersifat terbuka sehingga perlu dilakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya (adaptasi). Strategi Reinventing Government yang menggabungkan kekuatan struktural dan kultural merupakan jawaban dari lingkungan yang berkembang dalam birokrasi publik saat ini. Sikap Birokrasi yang dituntut untuk berjiwa entrepreneurship namun tetap mengedepankan kepentingan publik merupakan harapan rakyat Indonesia. Dengan demikian Strategi reinventing Government dapat menumbuhkan sikap dan perilaku birokrat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, birokrat yang inovatif, yang adaptif namun ada kontrol struktural atau kendali birokrasi sehingga menjadi birokrat yang bermartabat, bekerja semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Cassell, Philip. 1996. *The Giddens Reader*, California-USA: Stanford University press
- Handayani, Canti Tri. 2008. *Menemukan Kunci Reformasi Birokrasi*, TC Media, Edisi Ke 5, Jakarta.
- Kartono, Drajat Tri. 2006. “*Reformasi Administrasi: dari Reinventing ke Pesimisme*” Dalam Jurnal Spirit Publik Volume 2, No 1, April 2006, hal 51-62
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media
- Mariana, Dede. 2009. “*Reformasi Birokrasi dan Paradigma Baru Administrasi Publik di Indonesia*” Dalam Makalah Utama Konferensi Administrasi Publik, Surabaya , Mei 2009, hal 1-19
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1996, *Mewirauahakan Birokrasi: Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik dalam Abdul Rosyid (penerjemah)*, Jakarta: Pustaka Binawan Pressindo.
- Suryono, Agus, 2005. *Ekonomi Politik Pembangunan*, Malang: Brawijaya
- Thoha, Miftah. 1996. *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PD Batang Gadis.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar